

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19
DI KECAMATAN BINTAN TIMUR
KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

DELSA MALINDA

NIM : 19622094



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19
DI KECAMATAN BINTAN TIMUR
KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

Nama : DELSA MALINDA

NIM : 19622094

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19 DI KECAMATAN BINTAN
TIMUR KABUPATEN BINTAN**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

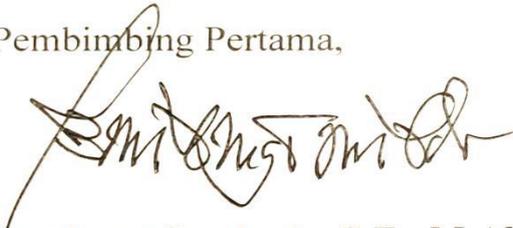
Oleh :

NAMA : DELSA MALINDA

NIM : 19622094

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

NIDK. 8833900016 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Vanisa Meifari, S.E., M.Ak

NIDN. 1026059301 /Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA

NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19 DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : DELSA MALINDA

NIM : 19622094

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Empat Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

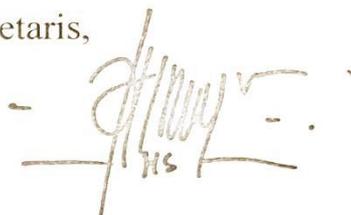
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Andres P Sitepu, S.E., M.Ak
NIDK. 8854290019 / Asisten Ahli

Sekretaris,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Anggota,



Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak
NIDK. 8968410021 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Juli 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak. Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Delsa Malinda
NIM : 19622094
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.47
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 14 Juli 2023

Penyusun,



Delsa Malinda
NIM : 19622094

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT Alhamdulillah rabbilalamin atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi saya ini dengan baik, yang ini merupakan rangkaian dari tugas akhir saya yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan ini kepada semua orang yang aku cintai dan kusayangi.

Keluargaku tercinta

Kedua orangtua saya tercinta saya ucapkan terimakasih selalu memberikan semangat, selalu memberikan dukungan doa, tenaga, motivasi buat saya sampai prosesnya selesai. Tiada kata yang pantas saya ucapkan atas jasa-jasa kalian yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan, serta memberikan arahnya dari lahir batin hingga sekarang ini. Keberhasilan saya dalam menyelesaikan masa studi S1 ini tidak terlepas dari doa kedua orangtua saya serta usaha saya untuk memberikan kebahagiaan dan menjadi kebanggaan untuk kalian. Terimakasih telah memberikan segalanya untuk saya, terimakasih atas pengorbanannya selama ini. Mungkin hanya doa dan kasih sayang yang hanya saya berikan kepada papa dan mamaku tercinta semoga Allah SWT selalu berikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani keberkahan dan kebahagiaan didunia maupun diakhirat. ☺

Sahabat dan Teman Seperjuangan Skripsi

Terimakasih untuk kalian semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk perjuangan, kenangan walaupun kita jarang jumpa tapi hal itu selalu memberikan warna yang tidak akan pudar terbawa zaman. Terimakasih dukungannya teman-teman sekalian.

HALAMAN MOTTO

“Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.”

- Bambang Pamungkas

*“Melakukan hal baik, belum tentu itu benar,
Melakukan hal benar, sudah tentu itu baik.”*

- Fardi Yandi

*“There is only one thing that makes a dream impossible to
achieve : the fear of failure.”*

- Paulo Coelho, The Alchemist

~ keep your eyes on the stars and your feet on the ground ~

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19 DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN”** yang merupakan salah satu syarat untuk saya memperoleh gelar Strata 1 (S1) program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan masukan yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., MHSc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak., CAO. CBFA. selaku Ketua Program Studi S1 akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Vanisa Meifari, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tak pernah lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta yang selalu memberikan support dan motivasi dalam situasi apapun serta terimakasih untuk doa yang dipanjatkan untuk anakmu sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
10. Terimakasih kepada kakakku Mega Anggelina, S.Pd yang telah membantu adikmu serta seluruh anggota keluargaku yang terus memberi dukungan, dorongan, semangat kepada penulis.
11. Terimakasih untuk Ade Prayoga Saputra, S.E your are the best support system.
12. Terimakasih kepada teman-teman kelas Akuntansi angkatan 2019 yang telah membantu penulis serta memberi motivasi selama pembuatan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada teman-temanku Monica, Dini Nurasikin yang mempunyai peran dalam menghibur menghadapi penelitian ini.
14. Terimakasih kepada teman satu bimbingan yaitu Sela Julia Agustuti telah memberikan dukungan, masukan serta menjadi pendengar bagi peneliti.
15. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih semuanya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, terutama kepada Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tanjungpinang, 14 Juli 2023

Penulis

DELSA MALINDA
NIM 19622094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori	10
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.2 Akuntabilitas.....	11
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas	11
2.1.2.2 Prinsip Akuntabilitas	13
2.1.2.3 Dimensi Akuntabilitas	14

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas.....	15
2.2 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	15
2.3 Kerangka Pemikiran	19
2.4 Penelitian Terdahulu	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Jenis Data	24
3.2.1 Data Primer	24
3.2.2 Data Sekunder	25
3.3 Subjek Penelitian	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4.1 Wawancara	26
3.4.2 Dokumentasi	27
3.5 Teknik Analisis Data	27
3.5.1 Reduksi Data	27
3.5.2 Penyajian Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	29
4.1.1.1 Profil Kecamatan Bintan Timur	29
4.1.1.2 Geografis Kecamatan Bintan Timur	29
4.1.1.3 Kondisi Penduduk dan Sosial Kecamatan Bintan Timur	30
4.1.2 Penyajian Data	35
4.1.2.1 Analisis Data Penelitian	35
4.1.2.1.1 Identitas Informan	36
4.2 Pembahasan	38
4.2.1 Perencanaan	39
4.2.2 Pelaksanaan.....	42
4.2.3 Pelaporan	49

4.2.4 Pertanggungjawaban.....	50
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	20
2.	Informan Aparatur Pemerintahan	25
3.	Informan Masyarakat Penerima BLT Covid-19 di Kecamatan Bintang Timur	26
4.	Luas Wilayah per Desa di Kecamatan Bintang Timur	30
5.	Jumlah Penduduk Kecamatan Bintang Timur Tahun 2019	31
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan Agama.....	31
7.	Jumlah Penduduk Kecamatan Bintang Timur Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian Tahun 2019	32
8.	Jumlah Penduduk di Kecamatan Bintang Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	33
9.	Rekap Data Penduduk Yang Terdampak Covid-19 Kecamatan Bintang Timur Tahun 2020	34
10.	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintang Tahun 2019	34
11.	Identitas Peserta Penerima BLT di Kelurahan Kijang Kota	37
12.	Identitas Peserta Penerima BLT di Kelurahan Gunung Lengkuas.....	37
13.	Identitas Peserta Penerima BLT di Kelurahan Sei Lekop.....	38
14.	Identitas Peserta Penerima BLT di Kelurahan Sei Enam.....	38

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	19

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
	Lampiran 1 : Lembar Wawancara Aparatur Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Bintan
	Lampiran 2 : Lembar Wawancara Aparatur Pemerintahan Kecamatan Bintan Timur
	Lampiran 3 : Lembar Wawancara Aparatur Pemerintahan Kelurahan Kijang Kota
	Lampiran 4 : Lembar Wawancara Aparatur Pemerintahan Kelurahan Sei-Enam
	Lampiran 5 : Lembar Wawancara Aparatur Pemerintahan Kelurahan Sei-Lekop
	Lampiran 6 : Lembar Wawancara Aparatur Pemerintahan Gunung Lengkuas
	Lampiran 7 : Lembar Wawancara Masyarakat Penerima BLT Covid-19 Kelurahan Kijang Kota
	Lampiran 8 : Lembar Wawancara Masyarakat Penerima BLT Covid-19 Kelurahan Sei-Enam
	Lampiran 9 : Lembar Wawancara Masyarakat Penerima BLT Covid-19 Kelurahan Sei-Lekop
	Lampiran 10 : Lembar Wawancara Masyarakat Penerima BLT Covid-19 Kelurahan Gunung Lengkuas
	Lampiran 11 : Lembar Perbandingan Analisis Akuntabilitas
	Lampiran 12 : Foto Kwitansi PKH Tahap I Kelurahan Gunung Lengkuas
	Lampiran 13 : Foto Realisasi Data Penyaluran BLT Tahap II Kelurahan Sei Enam
	Lampiran 14 : Foto Wawancara Kepada Aparatur Pemerintahan dan Warga Penerima BLT Covid-19
	Lampiran 15 : Presentase Plagiat
	Lampiran 16 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19 DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN

Delsa Malinda. 19622094. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
delsamalinda@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 11 orang informan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan dan masyarakat penerima BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur yang akan memberikan informasi mengenai penerapan asas akuntabilitas dalam penyaluran BLT Covid-19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi BLT di Kecamatan Bintan Timur berdasarkan prinsip akuntabilitas yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 yang berdasarkan aktivitasnya dibuktikan bahwa penerima manfaat atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebar diseluruh Kecamatan Bintan Timur.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam implementasi BLT di Kecamatan Bintan Timur telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020.

Kata Kunci : Akuntabilitas, BLT, *Covid-19*

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Vanisa Meifari, S.E., M.Ak

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY ANALYSIS IN THE DISTRIBUTION OF COVID-19 DIRECT CASH ASSISTANCE IN BINTAN TIMUR DISTRICT

Delsa Malinda. 19622094. Accountancy. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
delsamalinda@gmail.com

The purpose of this study was to find out how Accountability for the Distribution of Covid-19 Direct Cash Assistance in Bintan Timur District. This study used a sample of 11 informants using interview and documentation techniques.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The subjects in this study were government officials and the recipient community of Covid-19 BLT in Bintan Timur District who would provide information regarding the application of the principle of accountability in the distribution of Covid-19 BLT.

The results of this study indicate that the implementation of BLT in Bintan Timur District is based on the principle of accountability, namely planning, implementation, reporting, and accountability in accordance with Regent Regulation Number 22 of 2020 which, based on its activities, proves that beneficiaries or KPM (Beneficiary Families) are spread throughout Bintan Timur District.

It can be concluded that the principle of accountability in the planning, implementation, reporting stages and accountability in the implementation of BLT in Bintan Timur District is in accordance with Regent Regulation Number 22 of 2020.

Keywords: Accountability, BLT, Covid-19

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Vanisa Meifari, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelang awal tahun 2020, Corona virus berubah menjadi kondisi medis di dunia. Kasus ini berawal dari informasi *World Health Organization* (WHO) pada 31 Desember 2019 yang menyatakan Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, memiliki kasus cluster pneumonia yang tidak jelas penyebabnya. Pandemi global berlangsung hingga Maret 2020 karena kasus Covid-19 terus berkembang dan menyebar luas. Virus ini berasal dari Indonesia dan tetap ada sejak saat itu. Angka kematian korban di Indonesia mencapai 8,9% dalam waktu singkat, hal ini terbukti berdampak pada kesehatan (Amri, 2020).

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada masyarakat dan ekonomi. Selain mengubah perekonomian, kondisi ini juga mengganggu pergerakan ekonomi. Menurut Carly (2020), pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 0,4% hingga 2,3% dalam jangka menengah, yang merupakan penurunan signifikan dari tingkat pertumbuhan 5% tahun sebelumnya (Carly, 2020). Sejak krisis akibat Covid-19 terjadi secara serentak, dampaknya dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, seperti kelompok usaha yang membutuhkan pertemuan besar, kelompok pekerja harian lepas, pekerja yang di-PHK, petani, fakir miskin, dan sebagainya (Eddyono et al., 2020).

Untuk menekan angka positif Covid-19, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah. Taktik pemerintah seperti lockdown, bekerja dari rumah, dan jarak sosial dianggap efektif (Chudik et al., 2020).

Namun, adanya kebijakan-kebijakan tersebut di atas menimbulkan tantangan baru bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Semua aspek kehidupan, terutama mobilitas ekonomi, dipengaruhi oleh terbatasnya ruang gerak.

Setiap jenis kebijakan pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan hingga program-program yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi perekonomian rakyat. Uang tunai, sembako, dan penurunan biaya listrik adalah beberapa bentuk bantuan yang ditawarkan kepada masyarakat di masa pandemi ini. Menurut Mufida (2002), tujuan utama dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sebagai bentuk perlindungan sosial, khususnya bagi mereka yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 terdapat beberapa program bantuan yang dibuat antara lain: Satu, Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta kepala keluarga penerima manfaat dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Kedua, pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima dimana setiap warga mendapatkan bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000/bulan. Ketiga, pembuatan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan mencairkan secara intensif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000/empat bulan. Keempat, pemberian potongan harga tarif listrik untuk 900 VA dan pemberian tarif listrik gratis 450 VA. Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di

Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat di luar Jabodetabek dimana jumlah yang diberikan tersebut sama, senilai Rp. 600.000/tiga bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000/bulan untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan-bantuan lainnya.

Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk meringankan dan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 serta pencegahan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Program yang dibuat oleh pemerintah tersebut diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan melakukan berbagai cara dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 terutama dalam *recovery* ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Bintan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53 miliar untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Kabupaten Bintan yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19 terutama pada perekonomiannya. Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Bintan diatur dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Bencana Non Alam Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Bintan.

Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa kategori penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Bintan, yaitu penerima BLT daerah,

penerima BLT pusat, dan penerima program keluarga harapan (PKH). Besaran BLT yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Bintan adalah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 600.000/bulan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Sosial Pangan Sembako sebesar Rp. 400.000/bulan. Adapun syarat dari penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Bintan adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako atau Kartu Prakerja. Berdasarkan validasi data yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bintan jumlah keseluruhan penerima BLT sebanyak 35.560 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian 26.428 Kepala Keluarga (KK) untuk penerima BLT daerah yang terdiri dari 18.813 usulan RT yang akan dibayarkan melalui APBD Bintan dan 7.615 kepala keluarga yang sumber dananya dari anggaran desa (APBDes) (Dinas Sosial Kabupaten Bintan, 2020).

Pemberian BLT Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia menuai berbagai respon dari masyarakat salah satunya adalah masih banyaknya yang kecewa terhadap penyaluran bantuan tersebut. Misalnya, dilaporkan dalam sejumlah laporan bahwa sebagian warga Jakarta menolak bansos karena dianggap tidak digunakan secara efektif. Kemudian ada warga Bali yang meninggal dunia yang masih tercatat sebagai penerima manfaat. Sementara itu, ada masalah dengan database penerima bantuan di Padang. Meskipun database sudah diperbaiki, namun masih terdapat kesalahan pada data penerima manfaat (Dewi, 2020).

Pelaksanaan program BLT Covid-19 juga mendapatkan berbagai kritikan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau mengatakan bahwa setiap Kementerian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron sehingga penerima bantuan tersebut menjadi tidak tepat sasaran seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (CNBC, 2020).

Selanjutnya, permasalahan penyaluran BLT Covid-19 juga di ungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mufida (2020) dalam artikelnya tentang *“Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19”*, studi kasus atau metode penelitian yang dilakukan di khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pembahasan bahwa dengan banyaknya jenis bantuan sosial yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta menyebabkan kekisruhan seperti kebingungan masyarakat akan pintu bantuan sosial yang mereka dapat, pendataan yang tidak tepat sasaran dan jangka waktu penyaluran bansos yang tidak serentak.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pemberian BLT Covid-19 masih menimbulkan beberapa permasalahan. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Bintan yaitu belum merataranya pemberian BLT seperti yang terlansir pada TribunBatam.com (2020) dalam artikelnya *“Penyaluran BLT Dianggap Belum Merata, Warga Datangi Kantor Desa”*. Selain itu, masih terdapat kekeliruan dalam pemilihan penerima BLT Covid-19, sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak tercatat, padahal mereka berhak atas bantuan

tersebut. Di sisi lain, banyak warga yang terdata tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi persyaratan BLT Covid-19.

Permasalahan penyaluran BLT di Kabupaten Bintan tersebut tentunya tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 dimana dalam pengelolaan serta pelaksanaan program BLT Covid-19, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah terkait. Jika pelaksanaan program tersebut tidak dijalankan secara akuntabel maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan dana serta rentan dengan tindakan korupsi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan”**. Penulis melakukan penelitian di lokasi Kecamatan Bintan timur yaitu Pertama, Kecamatan Bintan Timur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki warga masyarakat dengan populasi terbanyak di Kabupaten Bintan. Kedua, lokasi penulis berdekatan dengan daerah pengambilan data sehingga memudahkan penulis dalam pengumpulan data secara kualitatif. Ketiga, Kecamatan dengan populasi terbanyak di Kabupaten Bintan memungkinkan banyak masyarakat yang akan terdampak *covid-19* baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian yaitu “Bagaimana Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung

Tunai Covid-19 Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah mencegah terjadinya penyimpangan atau memperluas pokok bahasan sehingga penelitian lebih terarah dan memungkinkan pembahasan untuk mencapai tujuan penelitian. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
2. Subjek penelitian ini adalah masyarakat penerima BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur serta aparatur pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Sosial di Kabupaten Bintan.
3. Prinsip-prinsip akuntabilitas yang dalam penelitian ini terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi

bagi pemerintah Kabupaten Bintan dalam menerapkan proses akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 serta dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten

Penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana pemerintah kabupaten sendiri dalam menerapkan asas akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah khususnya di Kabupaten Bintan dalam menerapkan asas akuntabilitas dalam menyalurkan BLT Covid-19 kepada masyarakat penerima bantuan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian yang dihasilkan bisa digunakan untuk menambah wawasan dan referensi bagi para pembaca mengenai penerapan asas akuntabilitas penyaluran BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika

penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian, jenis data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwa adanya hubungan antara agen dan prinsipal memberikan kepercayaan pada kemungkinan bahwa teori keagenan terhubung ke sektor publik. Dimungkinkan untuk menafsirkan agen sebagai melaksanakan tanggung jawab khusus atas nama prinsipal dan bertanggung jawab atas tanggung jawab tersebut. Prinsipal berkewajiban untuk memberi kompensasi kepada agen atas layanan mereka. Konflik antara agen dan prinsipal sering muncul sebagai akibat dari perbedaan kewajiban. Para pelaku awal di masyarakat yang menjadi wali, serta para pelaku masyarakat dan kepala daerah (agen). Pemerintah daerah sendiri berfungsi sebagai penyedia layanan masyarakat (*civil service*), atau pengelola manajemen (*manage of management*). Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam organisasi sektor publik, masyarakat sendiri merupakan prinsipal yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah (PEMDA) dapat digambarkan sebagai agen dan publik.

Mengenai hubungan antara agen dan prinsipal, akuntabilitas menjadi konsekuensi logis. Menurut teori keagenan, pengawasan legislatif terhadap anggaran eksekutif merupakan mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepastian. Menurut Mayasari (2017), pemantauan diperlukan untuk mengukur dan meramalkan tujuan peluang untuk melakukan intervensi

dalam kegiatan yang diharapkan.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu bahwa otoritas publik bertindak sebagai spesialis atau pengawas pemerintah yang harus menyusun metodologi khusus untuk memberikan dukungan terbaik kepada masyarakat umum sebagai kepala atau daerah setempat. Laporan keuangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan indikasi dari keinginan masyarakat akan hasil kinerja yang baik dari para agen, terbukti dengan laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi pemerintah. Masyarakat akan percaya kepada pemerintah jika kinerjanya baik. Kesimpulannya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai agen akan terpengaruh jika kinerja pemerintah baik.

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Melalui pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintah, akuntabilitas berarti menciptakan kondisi untuk saling mengawasi dan mengurangi akumulasi kekuasaan. Mereka yang diamanatkan oleh pemerintah bertanggung jawab kepada mereka yang memberi mereka mandat.

Akuntabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Rusdiana dan Nasihudin (2018), mengacu pada seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pihak yang mengeluarkan amanah, baik secara vertikal maupun horizontal. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, asas akuntabilitas mengatur bahwa pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil kepada masyarakat desa.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah kewajiban pemberi fidusia (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi fidusia (principal), yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban, serta menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatannya. itu adalah tanggung jawabnya. Menurut Fajri (2019), akuntabilitas adalah tanggung jawab organisasi publik untuk melaporkan informasi mengenai akuntabilitas pemerintah secara cepat dan akurat. Menurut Br Purba dkk. (2018), akuntabilitas adalah kewajiban individu atau organisasi untuk mengungkapkan (disclose) kinerja dan aktivitas keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Setyanto (2018) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah suatu bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan keuangan, akomodasi laporan moneter seluk beluk, dan konsistensi dengan strategi atau peraturan dan pedoman yang sah.

Menurut pendapat sejumlah ahli, akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban di mana individu, organisasi, pimpinan, dan pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta informasi pertanggungjawaban pada tingkat teknis dan administratif dapat menjelaskan dan menanggapi semua tindakan kinerja. Karena akuntabilitas yang dipersyaratkan mencakup keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan instansi yang bersangkutan, maka baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa harus memahami ruang lingkup pertanggungjawabannya masing-masing berdasarkan konsep multiple expert.

Pelaksanaan akuntabilitas dilakukan di berbagai sektor dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah :

1. Penerapan akuntansi publik.

2. Kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri.
3. Kualitas laporan keuangan.
4. Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan.
5. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.
6. Kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan.

2.1.2.2 Prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKP (2020), prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Prinsip akuntabilitas harus dipatuhi dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk memastikan penerima BLT benar-benar layak menerima bantuan, prinsip akuntabilitas harus diterapkan. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat,

akuntabilitas adalah kewajiban hukum atau moral dari individu, perusahaan, atau kelompok untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana pihak ketiga menggunakan peralatan, uang, atau wewenang. Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Bencana Non Alam Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Bintan terdapat beberapa prinsip akuntabilitas yang harus dijalankan diantaranya :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pelaporan
- d. Pertanggungjawaban

2.1.2.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2016) terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil dengan biaya yang minimal.

- d. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil.
- e. Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas

Perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi pengembangan akuntabilitas publik, memerlukan penggunaan akuntansi sektor publik. Adapun indikator akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:

1. Setiap keputusan dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dengan cara dituliskan dan tersedia bagi warga negara yang membutuhkan.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Akses masyarakat terhadap informasi suatu keputusan setelah keputusan diambil, penyebaran informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, dan tata cara pengaduan masyarakat.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

2.2 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah proyek yang bertujuan untuk

menjalankan program melalui upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Peluncuran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sentralistik dan bertujuan untuk mengurangi himpitan masalah ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin akibat adanya pandemi *Covid-19*. (Kurniawan, 2020).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu dari sekian banyak program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, dan berasal dari salah satu dari tiga kluster program. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masuk dalam kluster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam kluster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa (Imawan, 2017).

Menurut Imawan (2017) selain melaksanakan kluster I, Pemerintah Republik Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam kluster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam kluster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaankluster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam program bantuan langsung tunai (BLT) adalah kebijakan pemerintah dengan tujuan dan justifikasi tertentu. Program tersebut tampak sebagai tindakan pemerintah dengan nilai-nilai tertentu yang bertujuan untuk menggunakan sumber

daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik. Masalah yang dihadapi adalah kemiskinan, yang merupakan masalah publik. Secara umum, orang dianggap hidup dalam kemiskinan ketika mereka memiliki akses ke segala hal kecuali kebutuhan paling dasar, termasuk perumahan, pendidikan, peluang bisnis, dan sumber daya produksi.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Adapun tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Secara alami, peran yang dimainkan pemerintah dalam perekonomian sangat penting. Peran yang diharapkan adalah salah satu sifat positif dalam arti bahwa merupakan kewajiban moral untuk berkontribusi pada realisasi kesejahteraan semua orang dengan memastikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial dan mempertahankan arah ekonomi yang benar.

Menurut Maun (2020) dana desa sebesar yang dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu sekitar 31 persen dari total Rp 72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 12,3 juta kepala

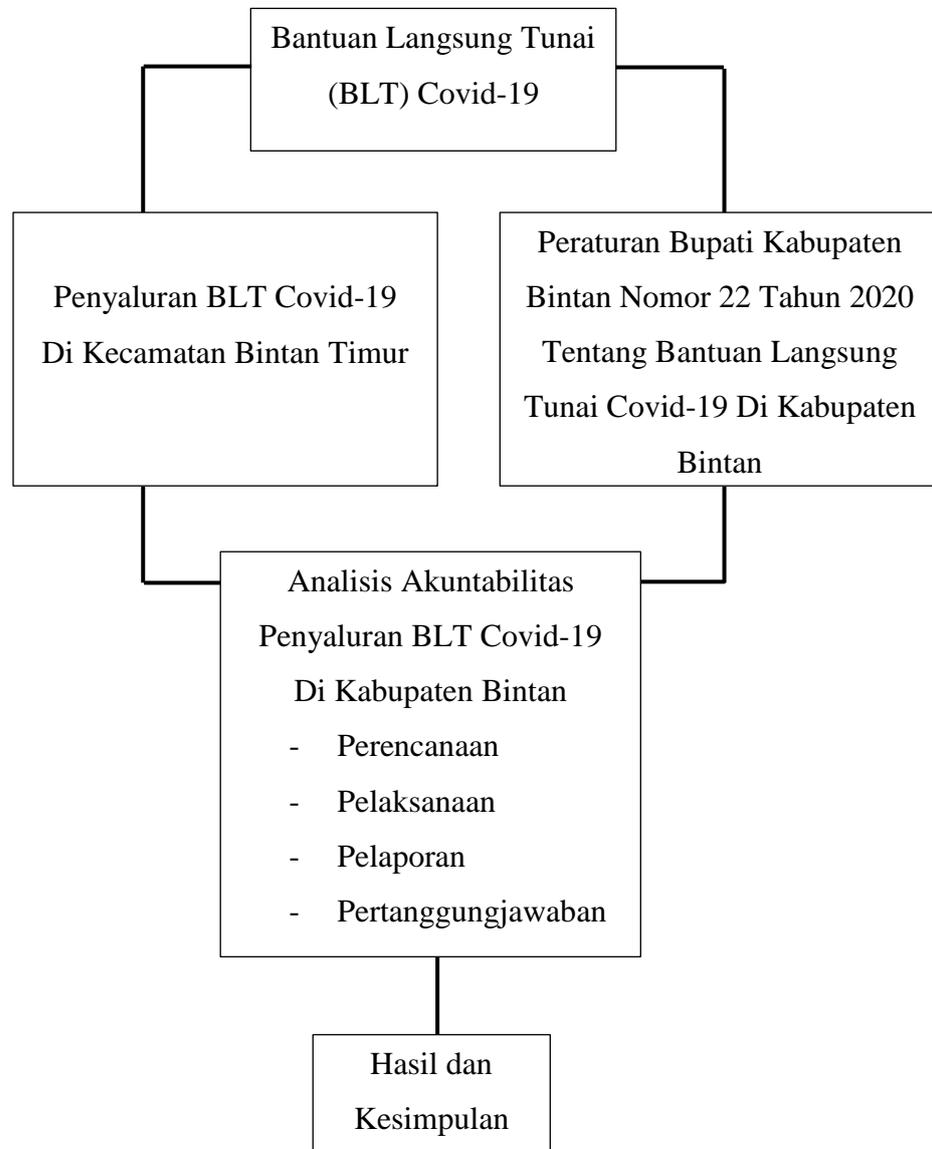
keluarga (KK) yang terdampak *Covid-19* yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp. 600.000/tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta.

Alokasi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa, yaitu:

- 1) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp. 800 juta, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan 25 persen.
- 2) Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp. 1,2 Miliar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan 30 persen.
- 3) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp. 1,2 Miliar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan 35 persen.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam perekonomian mutlak diperlukan. Peran yang diharapkan adalah salah satu kepositifan berupa kewajiban moral untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial guna berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat; menjaga ekonomi bergerak ke arah yang benar.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan sejumlah contoh dari penelitian sebelumnya untuk membandingkan karya penulis dengan penelitian lain. sehingga penulis dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan penelitian sebelumnya dan

membandingkannya dengan penelitian saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait yaitu:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi/Tesis/Jurnal	Hasil Penelitian
1.	(Kurniawan, 2020)	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa.	Hasil studi menunjukkan indikasi kemampuan desa dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara transparan dan akuntabel. Faktor kuncinya adalah kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia di desa, kejelasan kriteria calon penerima dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD),serta keterlibatan

			<p>berbagai kepentingan dalam proses (partisipatif). Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-DD boleh jadi akan lebih baik jika didukung dengan data dasar dan koordinasi kebijakan antar Lembaga pemerintahan harmonis.</p>
2.	(Mufida, 2020)	Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic covid-19.	<p>Hasil penelitian dalam pembahasan tentang Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi covid-19 diperoleh kesimpulan bahwa banyaknya kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan jenis bantuan sosial menyebabkan kebingungan dan kekisruhan.</p>

3.	(Maun, 2020)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab, itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat
----	--------------	---	--

			mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.
--	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif akan menjadi metode pilihan untuk menyelidiki. Suatu metode atau pencarian gejala sentral disebut sebagai penelitian kualitatif. Untuk mengidentifikasi gejala sentral, peneliti melakukan wawancara dengan partisipan dan mengajukan pertanyaan umum dan khusus. Data berupa kata-kata atau teks kemudian dikumpulkan dan dibedah.

Untuk penelitian pada objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan) sedangkan metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme (Sugiyono, 2017). Fakta bahwa pengolahan data, penyajian, verifikasi, dan kesimpulan tidak mengandalkan perhitungan matematis atau statistik tetapi lebih menekankan studi interpretatif memiliki implikasi untuk penggunaan ukuran kualitatif secara konsisten. Studi interpretatif sendiri merupakan studi yang dijelaskan oleh peneliti dengan menggunakan kata-kata atau deskripsi yang berasal dari data lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan wawancara kepada pihak aparat pemerintah terkait penerapan asas akuntabilitas dalam penyaluran BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur. Penelitian studi kasus ini meneliti suatu kasus mengenai penerapan asas akuntabilitas dalam penyaluran BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat penerima BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur sebagai informan terkait objek penelitian mengenai penerapan asas akuntabilitas penyaluran BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur.

3.2.2 Data Sekunder

Data yang digunakan untuk mendukung data primer disebut sumber data sekunder. Sumber-sumber tersebut antara lain buku, arsip tertulis, dan studi literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017), sumber sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti orang lain atau dokumen.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu sebagai informan yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di tempat penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan dan masyarakat penerima BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur yang nantinya akan memberikan informasi mengenai penerapan asas akuntabilitas dalam penyaluran BLT Covid-19. Aparatur pemerintahan dan masyarakat penerima BLT Covid-19 yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Informan Aparatur Pemerintahan

Instansi	Jabatan	Jumlah Informan
Dinas Sosial Kabupaten Bintan	Kepala Dinas	1
Kecamatan Bintan	Camat Bintan Timur	1

Timur		
Kelurahan Kijang Kota	Lurah Kijang Kota	1
Kelurahan Sei-Enam	Lurah Sei-Enam	1
Kelurahan Sei-Lekop	Lurah Sei-Lekop	1
Kelurahan Gunung Lengkuas	Lurah Gunung Lengkuas	1
Jumlah		6

Sumber : Kantor Camat Bintan Timur, 2019

Tabel 3. Informan Masyarakat Penerima BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur

No	Informan	Jumlah Informan
1.	Kelurahan Kijang Kota	5
2.	Kelurahan Sei-Enam	2
3.	Kelurahan Sei-Lekop	2
4.	Kelurahan Gunung Lengkuas	2
Jumlah		11 Informan

Sumber : Kantor Camat Bintan Timur, 2019

Bahwasannya untuk penelitian masyarakat penerima BLT Covid-19 ini di setiap masing-masing kelurahan di Kecamatan Bintan Timur ada 11 informan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2017), wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga dapat dikonstruksi makna topik tertentu. Untuk memastikan bahwa Anda dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin dan secara rinci, metode wawancara dipraktikkan dengan ketat. Dalam penelitian ini wawancara

akan ditunjukkan kepada aparaturnya pemerintahan dan masyarakat penerima BLT Covid-19 di Kecamatan Bintan Timur terkait bagaimana penerapan asas akuntabilitas penyaluran BLT Covid-19 di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bintan. Pedoman wawancara bagi masyarakat dan aparaturnya pemerintahan terdapat di lampiran 1 dan 10.

3.4.2 Dokumentasi

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa penting yang telah terjadi. Dokumen itu bisa ditulis, digambar, atau karya besar orang lain. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan mengenai penyaluran BLT-Covid 19 di Kecamatan Bintan Timur.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan bahwa terdapat tiga aktivitas dalam teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini peneliti melakukan aktivitas tersebut secara bertahap sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Proses pemilihan, berkonsentrasi pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data dikenal sebagai reduksi data. Menurut Hadi (2015), reduksi data dilakukan agar subjek yang diteliti lebih diperhatikan dan persyaratan kecukupan

konteks untuk evaluasi temuan penelitian terpenuhi.

Sebelum melakukan reduksi data harus mencari data terlebih dahulu dengan melakukan wawancara kepada informan. Hasil wawancara tersebut kemudian dibuat dalam bentuk transkrip wawancara untuk dilakukan reduksi data. Reduksi data tersebut terkait mengenai penerapan asas akuntabilitas penyaluran BLT Covid-19.

3.5.2 Penyajian Data

Setelah data di reduksi, kemudian hal yang harus dilakukan adalah menyajikan data berupa uraian singkat dan bagan. Sugiyono (2017) menyatakan jika yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks bersifat naratif. Bentuk penyajian data dalam penelitian penerapan asas akuntabilitas penyaluran BLT Covid-19 ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang berupa diagram atau bagan, catatan lapangan agar memudahkan untuk dibaca dan menarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 123-130.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Br. Purba, E. E., Darlis , E., & Wiguna , M. (2018). Pengaruh Reputasi KAP, Komite Audit dan pergantian Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan Pemoderasi Corporate Governance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016). *Jurnal Ekonomi*. Vol 26, No.4, 116-119.
- Carly Erfly Fernando Maun. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Politico*, Vol. 9, No. 2, April 2020
- Chudik, A, K Mohaddes, M H Pesaran, M Raissi and A Rebucci (2020), “A Counterfactual Economic Analysis of Covid-19 Using a Threshold Augmented Multi-Country Model” *Journal of Economic Surveys* 30 (1): 165–197.
- Cohen, et al. (2017). *Metode Penelitian dalam Pendidikan*. New York. Routledge.

CNBC. (2020). Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data. Retrieved June 26, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20501305/kekacauan-bansos-corona-masalah-klasik-big-data>

Dewi, R. S. (2020). Berita - Ombudsman RI. Retrieved June 24, 2020, from Ombudsman RI website: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19->

Eddyono, Suzanna, *et. al.* (2020). Pandemi dan Yang Tersingkir: Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.

Fajri, Rahmi. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.3, No.7, Hal.1099-1104.

Hadi, Samsul. (2015). *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.

Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID19 Pandemic. (June), 1–7.

Imawan, Wynandin. (2017). Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2017, Bappenas, Jakarta.

Jensen and Meckling. (1976). *Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost and Ownership Structure.*

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19

Kurniawan, A. (2020). Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa. 4, 1–8.

LAN & BPKP. (2020). *Akuntabilitas dan Good Governance.* Penerbit Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Mais, G., Rimi & Palindri, Lini. (2020). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa.* Jurnal Akuntansi dan Governance. Vol. 1, No. 1, hal : 57-66.

Mahmud. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Pustaka Setia.

Mahmudi. (2016), *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maun, C. E. . (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico*, 9 (2), 1–16.

Mayasari, Rosalina Pebrica. (2017). Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Universitas Tridinanti Palembang. Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius), Vol. 2, No. 1.

Mekarisce, A., Arnild. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol. 12, 145-151.

Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159–166

Mursyidi. (2016). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Bencana Non Alam Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Bintan.

Rusdiana, A.& Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung. ISBN 978-602-5823-04-6

Sedarmayanti. (2017). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89–105.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

TribunBatam.(2020). Berita- Penyaluran BLT Dianggap Belum Merata, Warga Datangi Kantor Desa website : <https://batam.tribunnews.com/2020/05/12/penyaluran-blt-dianggap-belum-merata-warga-datangi-kantor-desa-gunung-kijang-camat-sudah-clear?page=2>

CURRICULUM VITAE



A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Delsa Malinda
Gender : Female
Place and Date of Birth : Kijang 12 December 2000
Citizen : Indonesia
Age : 23 years old
Present Address : Kp. Baru Keke
Religion : Islamic
Email : delsamalinda@gmail.com
Phone Number / WA : 0819 0540 3185

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

TYPE OF SCHOOL	NAME OF SCHOOL & LOCATION	NO. OF YEAR COMPLETED
Elementary School	SDN 005 BINTAN TIMUR	2013 year
Junior High School	SMPN 2 BINTAN TIMUR	2016 year
Senior High School	SMKN 1 BINTAN TIMUR	2019 year
University	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2023 year